

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada bab I serta hasil analisis pada bab IV. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat lima hal yang penulis simpulkan dalam bab ini sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi yang berjudul “Kedudukan Vatikan Pasca Unifikasi Italia (Kajian Historis Tahun 1871-1929)” ini. *Pertama*, Bagaimana kondisi sosial-politik Negara Kepausan sebelum unifikasi Italia tahun 1870?. *Kedua*, bagaimana kondisi sosial-politik Negara Kepausan setelah unifikasi Italia tahun 1871?. *Ketiga*, mengapa terjadi ketegangan antara Vatikan dengan Kerajaan Italia?. *Keempat*, bagaimana usaha Paus dalam mempertahankan kedaulatannya?. *Kelima*, bagaimana proses penyelesaian ketegangan antara Vatikan dengan Kerajaan Italia. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

Pertama, Negara Kepausan sebelum unifikasi Italia tahun 1870 tidak terlepas dari peran gereja yang begitu mendominasi terutama di wilayah-wilayah Negara Kepausan. Pada pembahasan pertama ini penulis menggunakan pendekatan interdisipliner ilmu Tata Negara yaitu konsep negara yang mengacu pada integrasi kekuatan politik dalam mengatur hubungan masyarakat. Selain itu, penulis menggunakan konsep dari ilmu Politik yaitu kekuasaan yang mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok yang mempengaruhi sehingga orang yang dipengaruhi dapat menjalankan keinginan orang yang mempengaruhinya.

Kondisi sosial politik Negara Kepausan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukannya yang menganut teori Ketuhanan di mana negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan, lalu Tuhan mengutus wakilnya untuk memerintah di bumi. Dalam hal ini, Paus yang memerintah dapat dikatakan sebagai wakil Kristus sehingga segala perintah Paus tidak dapat ditolak karena apabila menolak Paus, hal itu berarti menolak segala perintah Tuhan. Hal inilah yang membuat pihak gereja begitu mendominasi kehidupan sosial dan politik di wilayah Negara Kepausan. Kekuasaan dalam bidang sosial dan politik ini disebut dengan kekuasaan sementara (*temporal power*). Kekuasaan ini awalnya berasal dari teori dua belah pedang yang dianut oleh Vatikan di mana Paus menganggap bahwa kedudukan Paus lebih tinggi dari pada raja atau kaisar baik itu dalam bidang spiritual maupun dalam bidang keduniawian sehingga inilah yang menjadikan Negara Kepausan dapat berkuasa dengan kekuasaan semmentaranya selama 1000 tahun lamanya. Selain adanya teori dua belah pedang ini, Negara Kepausan atau Vatikan juga memiliki suatu *Plenitudo Potestatis* dikeluarkan oleh Paus Innocentius IV yang dapat diartikan sebagai kedaulatan atau hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Paus terutama dalam bidang sosial dan politik. Dalam aspek sosial, Negara kepausan begitu mendominasi dalam bidang pengadilan. Pengadilan sekuler sebenarnya tidak banyak mempengaruhi maka selanjutnya pengadilan itu digantikan dengan pengadilan agama seperti inkuisisi yang diberlakukan oleh gereja. Pengadilan agama seperti inkuisisi ini menimbulkan rasa ketakutan di hati rakyat. Lalu dalam bidang politik Negara Kepausan begitu mendominasi tidak hanya di wilayah Negara Kepausan tetapi di negara-negara

Eropa lain di luar Negara Kepausan. Dominasi ini dapat dilihat ketika pada acara penobatan raja di Eropa yang pemakaian mahkotanya harus dilakukan oleh Paus. Apabila tidak dilakukan oleh Paus maka itu dapat dikatakan tidak sah sehingga sewaktu-waktu raja dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya.

Kekuasaan temporal atas wilayah Kepausan dan negara di luar Negara Kepausan ternyata mendapatkan tantangan dari berbagai pihak terutama rakyat di berbagai wilayah Negara Kepausan. Mereka telah terlalu jenuh atas dominasi gereja yang begitu kuat dalam bidang sosial dan politik, apalagi masalah ini didukung oleh Kerajaan Piedmont yang ketika itu ingin menghapuskan Negara Kepausan karena Italia bersatu nantinya akan terwujud di bawah dinasti Sayoy. Maka dari sinilah timbul gerakan-gerakan anti Kepausan, baik itu yang dilakukan secara terang-terangan maupun gerakan bawah tanah sampai akhirnya unifikasi Italia berakhir pada tahun 1870 dengan dijadikannya Roma menjadi ibukota Kerajaan Italia. Hal tersebut sekaligus menghapus Negara Kepausan serta kekuasaan temporalnya.

Kedua, kondisi sosial dan politik Negara Kepausan pasca unifikasi Italia tahun 1870 dalam keadaan tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh Negara Kepausan harus dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar dari wilayah di Negara Kepausan menginginkan untuk bersatu dengan Kerajaan Italia yang baru berdiri dan menginginkan kekuasaan gereja dibatasi. Pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep dari ilmu Politik yaitu kekuasaan sangat berperan penting dalam mengungkap kondisi sosial politik. Keadaan ini tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan temporal yang begitu besar sehingga sangat

mendominasi kehidupan sosial dan politik di berbagai wilayah Negara Kepausan, sehingga ketika rasa jenuh itu muncul dan dengan mudah akan terjadi suatu gerakan untuk menjatuhkan Negara Kepausan. Ternyata niat ini diketahui oleh Kerajaan Piedmont-Sardinia yang ketika itu juga memiliki niat yang sama untuk menghancurkan Negara Kepausan. Maka dari itu, segala bentuk gerakan anti Kepausan mendapat dukungan dari Dinasti Savoy, sampai akhirnya kekuasaan temporal yang telah berlangsung lama itu kemudian hilang dan banyak wilayah Negara Kepausan hilang diakibatkan oleh penggabungan wilayah ke dalam Kerajaan Italia yang baru terbentuk. Vatikan adalah sisa Negara Kepausan yang masih bertahan.

Ketiga, ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Vatikan dengan Kerajaan Italia diakibatkan oleh proses unifikasi Italia yang menyebabkan Paus kehilangan kekuasaan temporalnya dan memaksa Paus untuk berkuasa hanya pada bidang spiritual dengan wilayah yang tersisa di Vatikan. Pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep konflik dari Sosiologi berperan penting dalam mengkaji permasalahan ini. Konflik yang dikatakan sebagai "*Roman question*" dalam pembahasan ini terjadi ketika Paus menganggap unifikasi Italia merupakan suatu cara untuk menghilangkan kekuasaan temporal Paus dan itu merupakan suatu perebutan wilayah yang tidak sah karena Paus menganggap bahwa Negara Kepausan itu merupakan negara merdeka. Jadi menurutnya tidak pantas apabila ada pihak-pihak yang merebut dan kemudian membentuk negara baru. Konflik atau ketegangan ini terjadi selama 59 tahun dan melewati masa pontifiat sampai lima Paus yaitu Paus Pius IX, Paus Leo XIII, Paus Pius X, Paus Benedictus XV

dan Paus Pius XI. Sebenarnya selama konflik ini berlangsung, Kerajaan Italia telah berusaha untuk mengurangi ketegangan di antara keduanya dengan mengeluarkan Undang-Undang Penjaminan. Namun hal itu ditolak begitu saja oleh Paus Pius IX karena undang-undang itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu Kerajaan Italia dan Paus Pius IX menyatakan dirinya sebagai “tawanan di Vatikan”. Langkah ini kemudian diikuti oleh Paus-Paus berikutnya.

Keempat, upaya-upaya Vatikan yang diwakili oleh Paus dalam mempertahankan kedaulatannya terjadi dalam bidang spiritual dan bidang duniawi. Penggunaan konsep kedaulatan yang mengacu pada kekuasaan tertinggi dan mutlak yang diperoleh dari ilmu Tata Negara sangat berperan penting untuk mengungkapkan sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh Paus dalam mempertahankan kedaulatan yang di satu sisi kedaulatan yang diakui oleh negara-negara lain hanya kedaulatan pada bidang spiritual.

Upaya yang dilakukan oleh Paus Pius IX yaitu dengan mengeluarkan *syllabus of error* atau infabilitas yang menyatakan bahwa Paus tidak pernah salah. Upaya ini dikeluarkan untuk melawan gerakan Modernisme yang mulai memasuki kehidupan gereja. Selain itu juga selama “*Roman question*” terjadi, ia melarang kepada setiap orang Katholik untuk tidak ikut serta dalam pemerinthan di Kerajaan Italia, karena hal itu dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap Kerajaan baru tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Paus Leo XIII tidak hanya menekankan kepada aspek spiritual seperti mengeluarkan *rerrum novarum* yang dapat dikatakan sebagai piagam sosial. Ia mencoba menjalankan usaha yang seimbang dalam mempertahankan kedaulatan. Namun di sisi lain, upaya yang

dilakukannya terlihat lebih condong kepada upaya mempertahankan kedaulatan dengan mencari dukungan di dunia internasional dengan melibatkan diri dalam kancan perjanjian-perjanjian internasional. Sayangnya, upaya ini gagal karena negara-negara Eropa menginginkan Vatikan hanya fokus dalam bidang spritual dan negara-negara Eropa tidak akan membiarkan Vatikan menjadi negara kuat yang kekuasaannya begitu mendominasi seperti sebelum unifikasi Italia. Berbeda dengan pendahulunya, Paus Pius X lebih menekankan pada aspek spritual di mana pada masa pontifiatnya ia dikenal sebagai Paus yang konservatif. Ia menjalankan sensor yang ketat terhadap buku-buku yang mengandung unsur-unsur modern, segala bentuk yang mengarah kepada modern ia larang. Peraturan dan surat perintah mengharuskan sumpah anti modernis bagi semua Pendeta. Pemerintah Kepausan juga membentuk komite pengawas di setiap daerah untuk mencabut akar-akar ajaran sesat yang baru itu. ia juga mengeluarkan *lamentabili* dan surat ensiklik yang bernama *pascendi* dengan tujuan melawan modernisme. Upaya yang dilakukan oleh Paus Benedictus XV lebih terlihat karena pada waktu itu bertepatan dengan Perang Dunia I. Dalam situasi Perang Dunia I Vatikan bersikap netral. Upaya ini dapat dikatakan sebagai langkah nyata dalam dunia internasional yang dilakukan oleh Vatikan setelah sebelumnya Vatikan lebih terfokus kepada bidang spritual. Ia menyerukan kepada negara-negara yang saling berperang untuk mengakhiri peperangan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 8 September 1914, 1 Nopember 1914 dan 24 Desember 1914. Hal ini selalu diulangi oleh Paus apabila ada kesempatan. Ia juga mengutuk pelanggaran netralitas Belgia oleh Jerman yang berpedoman pada *not kennt kein Gebot*

“kesusahan tidak mengenal perintah”, dan yang menganggap perjanjian-perjanjian sebagai kertas sampah belaka. Ia mengutuk blokade terhadap pasokan bahan makanan untuk masyarakat yang kelaparan di Eropa Tengah. Ia memberi sumbangan bagi para korban peperangan, para korban, janda dan yatim piatu. Ia membentuk satu biro perhubungan antara tawanan dengan keluarganya, dengan semuanya itu pengaruh Kepausan makin meningkat. Upaya yang terakhir dilakukan oleh Paus Pius XI Pada masa kekuasaannya ia memulai dengan penyelesaian “*Roman question*”. Sudah sering Paus menunjukkan sikap baiknya terhadap pemerintah Italia, walaupun ia tetap menolak menyerahkan hak-hak Tahta Suci. Kebebasan Paus meminta bahwa Paus tidak boleh menjadi rakyat dari salah satu kekuasaan. Kebebasan gereja hanya dapat dipikirkan apabila Pausnya hidup bebas dalam satu negara bebas pula. Akhirnya pada masa pemerintahan Paus ini hubungan antara Vatikan dengan Kerajaan Italia membaik setelah 59 tahun lamanya mereka bersitegang.

Kelima, proses penyelesaian ketegangan di antara keduanya adalah ditandatanganinya Perjanjian Lateran dan Konkordat tahun 1929. Pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep kepentingan dari ilmu Politik yang mengacu kepada segala cara yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan sangat berperan penting dalam mengungkapkan kepentingan apa yang ada di balik Perjanjian Lateran dan Konkordat yang dilakukan oleh Kerajaan Italia dengan Vatikan. Perjanjian Lateran yang diprakarsai oleh Benito Mussolini pemimpin Fasis Italia ini dilakukan pada tanggal 11 Februari tahun 1929 di Istana Lateran. Perjanjian ini dilakukan karena kedua negara sama-sama memiliki kepentingan

untuk mempertahankan kekuasaan. Kepentingan Kerajaan Italia yang diwakilkan kepada Benito Mussolini memiliki kepentingan untuk memperkuat fasisme di Italia dengan dukungan Vatikan sehingga kedudukannya sebagai Perdana Menteri akan berlangsung lama. Sedangkan Vatikan memiliki kepentingan ingin memiliki Negara merdeka seperti sebelum unifikasi Italia. Kedua negara ini sama-sama menyepakati keinginan dari masing-masing lawannya seperti Italia yang menyetujui pembentukan negara merdeka untuk Vatikan dan Vatikan pun melakukan hal yang sama yaitu mendukung segala bentuk kebijakan Kerajaan Italia bahkan untuk membubarkan suatu gerakan aksi pemuda Katholik sekalipun. Sehingga dari perjanjian inilah mulai tercipta hubungan yang baik di antara kedua belah pihak.

